

# **PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2019**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kec. Banggai Tengah

Kab. Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791

Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544

e-mail : [pa.banggai@yahoo.co.id](mailto:pa.banggai@yahoo.co.id)

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Banggai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Banggai. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banggai, 02 Januari 2020

Sekretaris,

Muhammad Musyaffa, S.H.I.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**  
**JL. KI HAJAR DEWANTARA, BANGGAI**  
**TELEPON 0462 21544, FAXIMILE 04622705706**

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banggai, 02 Januari 2020  
Sekretaris,

Muhammad Musyaffa, S.H.I.  
NIP. 197703102007041002

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 3.014.248 atau mencapai 100,01 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 3.014.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 2.337.449.597 atau mencapai 98,19 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.380.653.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 2.224.772.797 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 2.842.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 2.213.097.047; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 2.224.772.797.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 1.171.410 dan Rp. 2.223.601.387.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah

sebesar Rp. 1,634,248, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 2,460,751,373 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (2,459,117,125). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 1,385,000 dan sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (2,457,732,125).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 2,175,995,973 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (2,457,772,125) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 40.000,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2,505,337,539 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp. 2,223,601,387.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### PENGADILAN AGAMA BANGGAI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.014.000	3.014.248	100,01	5.720.624
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.014.000</b>	<b>3.014.248</b>	<b>100,01</b>	<b>5.720.624</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	1.707.886.000	1.699.836.996	99,53	2.109.923.979
Belanja Barang	B.4	620.767.000	585.862.601	94,38	491.371.089
Belanja Modal	B.5	52.000.000	51.750.000	99,52	39.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.380.653.000</b>	<b>2.337.449.597</b>	<b>98,19</b>	<b>2.640.295.068</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## II. NERACA

### PENGADILAN AGAMA BANGGAI NERACA PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	705.600
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	2.842.000	6.788.000
Jumlah Aset Lancar		2.842.000	7.493.600
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	379.284.415	379.284.415
Peralatan dan Mesin	C.15	1.260.620.807	1.201.115.117
Gedung dan Bangunan	C.16	1.580.015.000	1.580.015.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	2.072.770	2.072.770
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(1.008.895.945)	(993.553.519)
Jumlah Aset Tetap		2.213.097.047	2.168.933.783
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	16.850.000	16.850.000
Aset Lain-Lain	C.22	163.646.500	200.469.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(171.662.750)	(217.319.000)
Jumlah Aset Lainnya		8.833.750	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.224.772.797</b>	<b>2.176.427.383</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	1.171.410	431.410
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.171.410	431.410
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>1.171.410</b>	<b>431.410</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	2.223.601.387	2.175.995.973
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>2.223.601.387</b>	<b>2.175.995.973</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>2.224.772.797</b>	<b>2.176.427.383</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

## PENGADILAN AGAMA BANGGAI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2019	2018
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1,594,248	797,124
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1,594,248</b>	<b>797,124</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	1,700,576,996	2,098,416,979
Beban Persediaan	D.3	42,153,800	31,914,800
Beban Barang dan Jasa	D.4	322,476,620	242,706,735
Beban Pemeliharaan	D.5	121,493,564	119,298,183
Beban Perjalanan Dinas	D.6	104,395,217	91,055,571
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	169,655,176	159,642,502
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>2,460,751,373</b>	<b>2,743,034,770</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(2,459,157,125)</b>	<b>(2,742,237,646)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		1,380,000	4,880,000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		5,000	60,500
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>1,385,000</b>	<b>4,940,500</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(2,457,772,125)</b>	<b>(2,737,297,146)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(2,457,772,125)</b>	<b>(2,737,297,146)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****PENGADILAN AGAMA BANGGAI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2019	2018
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	2,175,995,973	2,054,811,225
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2,457,732,125)	<b>(2,737,297,146)</b>
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	40,000	223,907,450
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	(223,907,450)
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	40,000	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		<b>2,505,337,539</b>	<b>2,634,574,444</b>
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	47,605,414	121,184,748
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>2,223,601,387</b>	<b>2,175,995,973</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banggai

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Pengadilan Agama Banggai didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Entitas berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No.1, Banggai Laut, Sulawesi Tengah.

Pengadilan Agama Banggai merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Banggai berkomitmen dengan visi akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Banggai berkomitmen dengan visi **“Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama Yang Agung dan Berwibawa”**. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Meningkatkan penyelesaian perkara.
- Meningkatkan aksesibilitas putusan hakim yang

berkualitas.

- Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- Meningkatkan aksepibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
- Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- Meningkatkan kualitas pengawasan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

**A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Banggai. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

**A.3. Basis Akuntansi**

Pengadilan Agama Banggai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

**A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Banggai dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan

mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Banggai. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

#### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi

sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Aset*

#### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### *Aset Lancar*

##### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan	0.5%

	s.d. tanggal jatuh tempo	
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa

nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

## **B. PENJELASAN ATAS P.OS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Banggai telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	2.974.000	2.974.000
Pendapatan Lain-lain	40.000	40.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.014.000</b>	<b>3.014.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	2.326.791.000	1.707.886.000
Belanja Barang	515.067.000	620.767.000
Belanja Modal	26.000.000	52.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.867.858.000</b>	<b>2.380.653.000</b>

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp. 3.014.248*

### **B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 3.014.248 atau mencapai 100,01 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.014.000. Pendapatan Pengadilan Agama Banggai terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2019		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	2.974.000	2.974.248	100,01
Pendapatan Lain-lain	40.000	40.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.014.000</b>	<b>3.014.248</b>	<b>100,01</b>

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2019 mengalami penurunan 47,31 persen dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pelayanan (jasa) akuntansi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Banggai. Selain itu, Pendapatan jasa Pengadilan Agama Banggai mengalami penurunan sebesar 47,61 persen yang berasal antara lain dari pendapatan dan pemindahtanganan BMN.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	2.974.248	5.677.124	-47,61
Pendapatan Lain-lain	40.000	43.500	-8,05
<b>Jumlah</b>	<b>3.014.248</b>	<b>5.720.624</b>	<b>-47,31</b>

*Realisasi*

*Belanja Negara*

*Rp.*

*2.337,449,597*

**B.2 Belanja**

Realisasi Belanja instansi pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 2.337.449.597 atau 98,19% dari anggaran belanja sebesar Rp. 2,380,653,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019*

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.707.886.000	1.700.018.668	99,54
Belanja Barang	620.767.000	585.862.601	94,38
Belanja Modal	52.000.000	51.750.000	99,52
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>2.380.653.000</b>	<b>2.337.631.269</b>	<b>98,19</b>
Pengembalian		(181.672)	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.380.653.000</b>	<b>2.337.449.597</b>	<b>98,19</b>

Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar 11,47% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja pegawai yang mengalami penurunan disebabkan oleh berkurangnya jumlah pegawai pada tahun 2019,

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.699.836.996	2.109.923.979	(19,44)
Belanja Barang	585.862.601	491.371.089	19,23
Belanja Modal	51.750.000	39.000.000	32,69
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.337.449.597</b>	<b>2.640.295.068</b>	<b>(11,47)</b>

*Belanja  
Pegawai Rp.  
1.699.836.996*

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.699.836.996 dan Rp. 2.109.923.979. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar 19,44 persen dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penurunan jumlah pegawai yang mana pada tahun 2019 sejumlah pegawai mutasi keluar dan tidak ada penambahan pegawai yang masuk ke Pengadilan Agama Banggai.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.699.836.996	2.109.923.979	(19,44)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.699.836.996</b>	<b>2.109.923.979</b>	<b>(19,44)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(181.672)	(1.008)	17.923,02
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.699.655.324</b>	<b>2.109.922.971</b>	<b>(19,44)</b>

*Belanja  
Barang Rp.  
585.862.601*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 585.862.601 da Rp. 491.521.000. Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan 19.19% dari Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja Barang dan Biaya Pemeliharaan Kantor

*Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	286.089.600	222.000.000	28,87
Belanja Barang Non Operasional	38.202.800	38.201.000	0,00
Belanja Jasa	35.681.420	30.200.000	18,15
Belanja Pemeliharaan	121.493.564	110.000.000	10,45
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	104.395.217	91.120.000	14,57
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>585.862.601</b>	<b>491.521.000</b>	<b>19,19</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>585.862.601</b>	<b>491.521.000</b>	<b>19,19</b>

*Belanja Modal  
Rp. 51.750.000*

**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 51.750.000 dan Rp. 39.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 32,69% dibandingkan TA 2018 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi, berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.750.000	39.000.000	32,69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>51.750.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>32,69</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>51.750.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>32,69</b>

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar 0 dan Rp 0. Realisasi

tersebut pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2018 tidak ada Pengadaan Tanah

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

***B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin***

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 adalah sebesar Rp 51.750.000, mengalami kenaikan sebesar 32.69 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp 39.000.000

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	51.750.000	39.000.000	32,69
Peralatan Komputer	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>51.750.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>32,69</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>51.750.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>32,69</b>

***B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan***

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal TA 2019 sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2018 Tidak ada Pembangunan

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

***B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan***

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 . Realisasi Belanja Modal TA sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan Tidak penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

***B.5.5 Belanja Modal Lainnya***

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 mengalami sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan Tidak ada pengadaan *software* untuk mendukung implementasi akuntansi pendapatan berbasis akrual.

*Belanja  
Bantuan  
Sosial Rp.0*

***B.6 Belanja Bantuan Sosial***

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan

sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2019 sebesar 0% dibandingkan TA 2018. Tidak adanya Bantuan Sosial Untuk Pengadilan Agama Banggai.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp.0*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 dan  
2018*

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Uang Tunai	-	-
Bank BERSAMA	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp.0*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2019 dan  
2018*

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Uang Tunai	-	-
Bank BERSAMA	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas Lainnya  
dan Setara  
Kas Rp 0*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2019 dan 2018*

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-

*Piutang PNB  
Rp.0*

### **4 Piutang PNB**

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBP TA 2019 dan 2018*

Uraian	TH 2019	TH 2019
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Bagian Lancar* **5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/  
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*TP/TGR  
Rp.0*

saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2019 dan 2018*

No	Nama	TH 2019	TH 2018
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-

*Bagian Lancar* **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

*TPA*

*Rp 0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA TA 2019 dan 2018*

No	Nama	TH 2019	TH 2018
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan*

*Piutang Tak*

*Tertagih –*

*Piutang Lancar*

*Rp 0*

**C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar  
TA 2019 dan 2018*

<b>Piutang</b>	<b>Jk Pendek</b>	<b>Penyisihan</b>	<b>Penyisihan</b>
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>	-	0,00%	-
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Bagian Lancar TPA</b>	-	0,00%	-
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-	-	-

*Belanja  
Dibayar di  
Muka Rp.0*

**C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.705.600 Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2019 dan 2018*

<b>Jenis</b>	<b>TH 2019</b>	<b>TH 2018</b>
Pembayaran layanan Hosting Wabsite	-	705.600
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>705.600</b>

*Pendapatan  
yang Masih*

**C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31

*Harus  
Diterima Rp.0*

Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus  
Diterima TA 2019 dan 2018*

Jenis	TH 2019	TH 2018
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Persediaan  
Rp2.842.000*

**C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.2.842.000 dan Rp.6.788.000

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan TA 2019 dan 2018*

Jenis	TH 2019	TH 2018
Barang Konsumsi	2,842,000	6.788.000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	2,842,000	6.788.000
<b>Jumlah</b>	<b>2,842,000</b>	<b>6.788.000</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan  
TP/TGR  
Rp.0

### C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing Pengadilan Agama Banggai Tidak Terdapat

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2019 dan 2018*

No	Debitur	TH 2019	TH 2018
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp.0

### C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Tidak ada Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA TA 2019 dan 2018*

No	Debitur	TH 2019	TH 2018
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang  
Jangka  
Panjang  
Rp.0*

**C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. tidak adanya Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2019*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

*Tanah  
Rp.379.284.415*

**C.14 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan

Agama Banggai per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.379.284.415 dan Rp.379.284.415. tidak ada Kenaikan nilai aset tetap Tanah. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>379.284.415</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>379.284.415</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah TA 2019*

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1,909 m2	JI Ki hajar Dewantara Desa Timbong	13.541.415
2	528 m2	JI Pattimura no 32 Kel Lompio	365.743.000
<b>Jumlah</b>			<b>379.284.415</b>

*Peralatan dan* **C.15 Peralatan dan Mesin**

*Mesin*

*Rp.1.260.620.807*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.1.260.620.807 dan Rp.1.201.115.117. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>1.201.115.117</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	52.350.000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	170.902.190
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	163.746.500
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>1.260.620.807</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	928.349.241
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>332.271.566</b>

Transfer Masuk peralatan kantor sebesar Rp. 170.902.190,- dari Mahkamah Agung RI.

*Gedung dan  
Bangunan*

*Rp.1.580.015.000*

### **C.16 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.1.580.015.000 dan Rp.1.580.015.000. tidak ada Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>1.580.015.000</b>
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>1.580.015.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(80.546.704)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>1.499.468.296</b>

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi*  
*Rp.0*

### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. Tidak terdapat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Pengadilan Agama Banggai tanggal pelaporan adalah

sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>-</b>
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>-</b>

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp.2.072.770*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.2.072.770 dan Rp.2.072.770. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>2.072.770</b>
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>2.072.770</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>2.072.770</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp.0*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 tidak ada pembangunan di pengadilan agama banggai

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp.1.008.895.945*

## **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp.1.008.895.945 dan Rp.993.553.519. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah ). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

### *Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2019 dan 2018*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.260.620.807	928.349.241	332.271.566
2	Gedung dan Bangunan	1.580.015.000	80.546.704	1.499.468.296
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	2.072.770	0	2.072.770
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>2.842.708.577</b>	<b>1.008.895.945</b>	<b>1.833.812.632</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak  
Berwujud  
Rp.16.850.000*

## **C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp.16.850.000 dan Rp.16.850.000

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Banggai berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak ada Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah

sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>16.850.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>16.850.000</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	(16.850.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>-</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud TA 2019*

<b>Uraian</b>	<b>Nilai Perolehan</b>
Apliasi SIADPA	16.850.000
<b>Jumlah</b>	<b>16.850.000</b>

*Aset Lain-Lain*  
*Rp.163.646.500*

**C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.163.646.500 dan Rp.200.469.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>200.469.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	(Rp36.822.500)
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>163.646.500</b>
Akumulasi Penyusutan	(154.812.750)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>8.833.750</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp.171.662.750*

### **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp.171.662.750 dan Rp.217.319.000 . Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	16.850.000	16.850.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>16.850.000</b>	<b>16.850.000</b>	<b>0</b>
Aset Lain-lain	163.646.500	154.812.250	8.834.250
<b>Jumlah</b>	<b>180.496.500</b>	<b>171.662.250</b>	<b>8.834.250</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka  
dari KPPN*

### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2019

*Rp.0*

dan 2018 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp.1.171.410*

### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.1.171.410 dan Rp.431.410. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Banggai per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
UM 12/2019	740.000	Pendapatan Jasa Giro belum disetor ke kas negara
Beban Langganan Air	21.000	Beban tagihan air bulan desember 2019
Beban Langganan Internet	357.500	Beban tagihan air bulan internet 2019
beban langganan telepon	52.910	Beban tagihan telepon bulan desember 2019
<b>Total</b>	<b>1.171.410</b>	

*Pendapatan Diterima di Muka Rp.0*

### **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya

lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah
	-
	-
	-
<b>Total</b>	-

*Beban yang Masih Harus Dibayar Rp.0*

**C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp.0 dan Rp.0 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2019 dan TA 2018*

Uraian	TH 2019	TH 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Ekuitas Rp.2.223.601.387*

**C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.2.223.601.387 dan Rp.2.175.995.973. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan  
PNBP*

*Rp.3.014.248*

**D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.3.014.248 dan Rp.5.720.624. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2019 dan 2018*

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	3.014.248	5.720.624	(47)
<b>Jumlah</b>	<b>3.014.248</b>	<b>5.720.624</b>	<b>(47)</b>

Pendapatan dari penjualan peralatan di mesin,pendapatsn sewa,gedung dan bangunan dan pengembalian persekot.

*Beban*

*Pegawai*

*Rp.1.700.576.9*

*96*

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.700.576.996 dan Rp.2.098.416.979. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

modal.

*Rincian Beban Pegawai TA 2019 dan 2018*

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	693.703.620	813.152.020	(15)
Beban Tunjangan-tunjangan	1.006.873.376	1.285.264.959	(22)
Beban Honorarium dan Vakasi	-	0	0
Beban Lembur	-	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.700.576.996</b>	<b>2.098.416.979</b>	<b>(19)</b>

*Beban*

*Persediaan*

*Rp.42.153.800*

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.42.153.800 dan Rp.31.914.800. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan 2018*

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	42.153.800	31.914.800	32
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>42.153.800</b>	<b>31.914.800</b>	<b>32</b>

*Beban Barang*

*dan Jasa*

*Rp.322.476.620*

*0*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.322.476.620 dan Rp.242.706.735. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul

karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Keprluan Perkantoran	233.933.700	180.682.100	29,47
Beban Pengiriman Surat dinas pos pusat	2.598.000	2.387.200	8,83
bebam honor opsional satuan kerja	38.040.000	38.040.000	0,00
beban barang opsional lainnya	12.223.500	9.600.000	27,33
beban langganan listrik	10.544.500	6.735.000	56,56
beban langganan telepon	634.920	662.435	(4,15)
beban langganan air	7.502.000	4.600.000	63,09
beban sewa	17.000.000	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>322.476.620</b>	<b>242.706.735</b>	<b>32,87</b>

*Beban*

*Pemeliharaan*

*Rp.121.493.564*

*4*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.121.493.564 dan Rp.119.298.183 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.025.000	63.168.500	1,36
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.468.564	56.129.683	2,39
<b>Jumlah</b>	<b>121.493.564</b>	<b>119.298.183</b>	<b>1,84</b>

*Beban*

*Perjalanan*

*Dinas*

*Rp.104.395.217*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.104.395.217 dan Rp.91.055.571 Beban tersebut merupakan beban yang

terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	104.395.217	91.055.571	14,65
<b>Jumlah</b>	<b>104.395.217</b>	<b>91.055.571</b>	<b>14,65</b>

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp.0*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Banggai untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2019. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Beban Bantuan Sosial Rp.0*

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.169.655.176*

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.169.655.176 dan Rp.159.642.502. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi

digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2019 dan 2018*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	129.381.824	119.319.150	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	40.273.352	40.273.352	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lain	-	50.000	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>169.655.176</b>	<b>159.642.502</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>169.655.176</b>	<b>159.642.502</b>	<b>-</b>

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp.0*

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp.1.385.000

#### D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Penjualan peralatan dan mesin	1.380.000	0	0,00
Pendapatan dari pemindahantangan BMN lainnya		4.880.000	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	5.000	60.500	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>1.385.000</b>	<b>4.940.500</b>	(71,97)

\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa  
Rp.0

#### D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut

##### Rincian Pos Luar Biasa TA 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan PNB di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena bencana longsor bukit. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

## **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### *Ekuitas Awal*

*Rp.2.175.995.973*

#### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.2.175.995.973 dan Rp.2.054.811.225

### *Defisit LO*

*Rp.2.457.732.125*

#### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.2.457.732.125 dan Rp.2.737.297.146 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### *Penyesuaian*

*Nilai Aset*

*Rp0*

#### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

### *Koreksi Nilai*

*Persediaan*

*Rp.0*

#### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Selisih*

**E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

*Revaluasi Aset Tetap Rp.0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0*

**E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2019*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Lain-Lain Rp.0*

**E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 40.000,- dan Rp.0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	40,000
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
<b>Jumlah</b>	<b>40,000</b>

*Transaksi*

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

*Antar Entitas*

*Rp.2.505.337.539*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.2.505.337.539 dan Rp.2.634.574.444. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(3.014.248)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.337.449.597
Transfer Masuk	170.902.190
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.505.337.539</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp. (3.014.248) sedangkan DKEL sebesar Rp. 2.337.449.597

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp170.902.190 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Mahkamah Agung Ri	170.902.190
	<b>Jumlah</b>		<b>170.902.190</b>

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0. dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp -</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp -</b>

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2019 disajikan pada lampiran.

*Ekuitas Akhir*

*Rp.2.223.601.387*

### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.2.223.601.387 dan Rp.2.175.995.973

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini yaitu belum lengkapnya progress Laporan Hasil Inventirsasi Penilaian Kembali Aset (LHIP) pada KPKNL , apabila ada koreksi nilai aset nantinya akan mempengaruhi nilai aset.

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

#### **F.2.1 Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

---

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester ini maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

#### **F.2.2 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual**

---

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual akan diungkapkan pada Semester II Tahun Anggaran 2019.

#### **F.2.3 Rekening Pemerintah**

---

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Banggai adalah :

1. PT. BRI (Persero) KCP Banggai Kepulauan A/C 0647-01-000023-30-3 a.n. BPG 053 PA BANGGAI yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0. Perubahan nama rekening sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian

Negara/Lembaga/Satuan Kerja

2. PT. BRI (Persero) KCP Banggai Kepulauan A/C 0647-01-000094-30-4 a.n. BPG 053 PA BANGGAI yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0. Perubahan nama rekening sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal 3 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
3. PT. BRI (Persero) KCP Banggai Kepulauan A/C 0647-01-000406-30-7 a.n. RPL 053 PA Banggai Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0. Pembukaan rekening lainnya penampung biaya perkara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja.

#### **F.2.4 Revisi DIPA**

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Revisi POK Ke-1 berupa pergeseran belanja barang yang tidak mengakibatkan perubahan nilai.
- Revisi Ke-2 DJA Ke-2 berupa Penambahan pagu Anggaran Belanja Modal
- Revisi Ke-3 berupa Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA
- Revisi Ke-4 DJA berupa Penambahan Anggaran Langganan Listrik

- Revisi Ke-5 berupa revisi POK
- Revisi Ke-6 berupa Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA.
- Revisi Ke-7 berupa revisi POK
- Revisi Ke-8 Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA.
- Revisi Ke-9 Dj Berupa Revisi Pagu minus

#### **F.2.5 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

- Terdapat ralat koreksi SPM No.0005 Tanggal 19 Maret 2019. Koreksi dimaksud dikarenakan Kesalahan Pembebanan Akun Pada Belanja Barang
- Terdapat ralat koreksi SPM No.0012 Tanggal 22 Februari 2019. Koreksi dimaksud dikarenakan Kesalahan Pembebanan Akun Pada Belanja Barang
- Ralat SPM no.00092 tanggal 27/12/2019 Kesalahan Kode Eselon Departemen dan Unit Kolom potongan.

#### **F.2.6 Catatan Penting Lainnya**

---

Tidak terjadi perubahan Pejabat Perbendaharaan pada Semester 2 Tahun 2019.

## **Data Pendukung Laporan Keuangan**

### **Daftar Isi**

**LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan**

**LRA Belanja dan Pengembalian Belanja**

**Neraca Percobaan**

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA :**

**Laporan Posisi BMN di Neraca**

**Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel per Kelompok**

**Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel per Kelompok**

**Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan**

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA BARANG :**

**Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset tak berwujud per Kelompok**

**Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi dalam Pengerjaan per Kelompok**

**Laporan Barang Persediaan**

**CATATAN RINGKAS BARANG MILIK NEGARA :**

**Laporan Catatan Ringkas Barang Milik Negara**

**Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak lanjut Temuan BPK**

**Daftar Rekening Kementerian/Lembaga 2019**

**Monitoring Penutupan Rekening Kementerian/Lembaga 2019**

**Berita Acara Rekonsiliasi Internal per 30 Juni Tahun Anggaran 2019**

**Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi Per 30 Juni Tahun Anggaran 2019**

**Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi BMN**

**Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

**Rekening Koran per 30 Juni Tahun Anggaran 2019**

**Berita Acara Opname Fisik Persediaan**

**Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan**



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Ki Hajar Dewantara, Banggai**

**Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544**

**Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791**

**e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id**